

Lampiran

Lampiran:

1. Instrumen-instrumen hukum penyokong Buku Pegangan Sphere	320
2. Kode Perilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Organisasi Non-Pemerintah dalam Respons Bencana	322
3. Penghargaan	333
4. Daftar Singkatan	336
5. Sekapur Sirih Masyarakat f Bencana Indonesia (MPBI)	337

1 Instrumen-Instrumen Hukum

Penyokong Buku Pegangan Sphere

Instrumen di bawah ini menyokong Piagam Kemanusiaan dan Standar-standar Minimum dalam Respons Bencana:

Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1969

The four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977.

Convention relating to the Status of Refugees 1951 and the Protocol relating to the Status of Refugees 1967.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948

Convention on the Rights of the Child 1989

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979

Convention relating to the Status of Stateless Persons 1960

Guiding Principles on Internal Displacement 1998

2 Kode perilaku Untuk Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) dalam Bantuan Respons Bencana

Disusun bersama-sama oleh Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan ICRC 1

Tujuan

Kode perilaku ini bertujuan menetapkan standar perilaku kami. Hal ini bukan merupakan perincian operasional, seperti bagaimana petugas menghitung ransum makanan atau membuat sebuah kamp pengungsi. Lebih daripada itu, pedoman ini bertujuan menetapkan standar kemandirian, keefektifan dan dampak yang diharapkan dari respon bencana LSM-LSM dan Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Ini merupakan pedoman sukarela, dilaksanakan dengan kesadaran oleh organisasi-organisasi yang menerimanya untuk menjaga standar yang ditetapkan dalam Pedoman.

Dalam peristiwa konflik bersenjata, Kode perilaku ini akan diinterpretasikan dan diaplikasikan sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Kode perilaku dipaparkan terlebih dahulu. Kemudian dilampirkan tiga lampiran yang menguraikan lingkungan

kerja yang kami harap dapat diciptakan oleh Pemerintah Nasional, Pemerintah Negara Donor dan Organisasi Antar-Negara dalam memfasilitasi penyampaian bantuan kemanusiaan secara efektif.

Definisi

NGO atau ORNOP: NGO (Non-Governmental Organisations, Organisasi Non-Pemerintah) adalah organisasi, baik nasional maupun internasional, yang keberadaannya terpisah dari pemerintah negara di mana ia didirikan.

NGHA: untuk kepentingan naskah ini, istilah Non-Governmental Humanitarian Agencies (NGHA) atau Lembaga Kemanusiaan Non-Pemerintah telah dibuat untuk menunjukkan komponen-komponen dari Gerakan Internasional Palang Merah Bulan Sabit Merah – Komite Internasional Palang Merah, Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan anggota Perkumpulan Nasionalnya – dan LSM yang didefinisikan di atas. Kode perilaku ini ditujukan untuk NGHA yang terlibat dalam respons bencana.

IGO: IGO (Inter-Governmental Organisations) atau Organisasi Antarnegara adalah organisasi yang didirikan oleh dua atau lebih pemerintah. Ini meliputi pula semua Lembaga PBB dan organisasi regional.

Bencana : adalah suatu kejadian yang berakibat hilangnya nyawa, penderitaan manusia yang luar biasa, dan kerusakan material yang berskala besar.

Kode perilaku

Prinsip-Prinsip dari Pedoman Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan ORNOP dalam Program Respons Bencana

1 Panggilan Kemanusiaan diutamakan terlebih dahulu

Hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan, dan untuk menawarkannya, merupakan sebuah prinsip kemanusiaan fundamental yang harus dimiliki oleh semua warga negara dari semua negara. Sebagai anggota dari komunitas internasional, kami menyadari kewajiban kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan dimana dibutuhkan. Oleh sebab itu kebutuhan akan akses tanpa dihalangi kepada penduduk korban bencana merupakan kepentingan mendasar dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Motivasi utama dari respon kami terhadap bencana adalah untuk mengurangi penderitaan diantara mereka yang paling kurang mampu untuk menanggung tekanan yang diakibatkan oleh bencana. Bilamana kami memberikan bantuan kemanusiaan maka tindakan ini bukanlah suatu tindakan keberpihakan atau tindakan politik dan seharusnya tidak dipandang seperti itu pula.

2 Bantuan diberikan tanpa memandang ras, agama atau kebangsaan dari penerima dan tanpa memilih kasih. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkan pada kebutuhan.

Sejauh memungkinkan, kami akan mendasarkan pemberian bantuan darurat pada suatu kajian yang seksama tentang kebutuhan korban bencana dan kapasitas setempat yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam keseluruhan program, kami akan mencerminkan pertimbangan akan perlunya keseimbangan. Penderitaan manusia harus dibantu dimana saja penderitaan itu dijumpai; kehidupan di satu bagian dari suatu negara sama berharganya dengan kehidupan di bagian lain di negara itu. Oleh sebab itu pemberian bantuan akan mencerminkan tingkat penderitaan yang ingin diatasi melalui pemberian bantuan tersebut. Dalam menerapkan pendekatan ini, kami menyadari peran penting dari perempuan anggota masyarakat rawan bencana dan akan memastikan bahwa peran ini akan didukung dan bukannya berkurang oleh program-program bantuan kami. Penerapan dari kebijaksanaan yang universal, tidak berpihak

dan mandiri, hanya dapat efektif jika kami dan mitra-mitra kami memiliki akses pada sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan bantuan yang berkeadilan, dan memiliki akses merata kepada semua korban bencana.

3 Bantuan tidak akan digunakan untuk kepentingan politik atau keagamaan tertentu

Bantuan kemanusiaan akan diberikan sesuai kebutuhan dari setiap individu, keluarga dan masyarakat. Walaupun NGHHA mempunyai hak untuk mempunyai pendapat politik dan keagamaan tertentu, kami menegaskan bahwa bantuan tidak akan tergantung kepada kepatuhan penerima bantuan terhadap kepercayaan-kepercayaan semacam itu. Kami tidak akan mengikat janji, pengiriman atau distribusi bantuan dengan tuntutan agar penerima mempercayai atau menerima kepercayaan politik atau agama tertentu.

4 Kami berusaha untuk tidak bertindak sebagai piranti politik luar negeri pemerintah kami

NGHHA adalah lembaga-lembaga yang bertindak secara mandiri dari pemerintah. Oleh sebab itu kami menyusun kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan kami sendiri dan tidak berusaha untuk melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah manapun, kecuali jika itu kebetulan sesuai dengan kebijaksanaan mandiri kami sendiri. Kami tidak akan membiarkan diri kami sendiri, atau pegawai kami - baik secara sadar maupun karena kelalaian - untuk dimanfaatkan guna memperoleh informasi yang peka tentang politik, militer, ekonomi untuk pemerintah-pemerintah atau badan-badan lain yang mungkin mempunyai kepentingan diluar tujuan kemanusiaan, kami juga tidak akan bertindak sebagai piranti dari kebijaksanaan luar negeri pemerintah donor. Kami akan mempergunakan bantuan yang kami terima untuk merespon kebutuhan dan bantuan ini tidak didorong oleh perlunya untuk menyalurkan surplus komoditi negara donor, juga bukan oleh kepentingan politik dari suatu negara donor. Kami menghargai dan mendorong kesukarelaan pemberian bantuan tenaga dan keuangan dari orang perorangan untuk membantu pekerjaan kami dan menghargai kemandirian

yang didasari motivasi kesukarelaan seperti itu. Demi melindungi kemandirian, kami akan menghindari ketergantungan kepada hanya satu sumber dana saja.

5 Kami harus menghargai kebudayaan dan adat istiadat

Kami akan berusaha menghormati kebudayaan, struktur dan adat istiadat dari masyarakat dan negara dimana kami bekerja.

6 Kami harus berusaha membangkitkan respon terhadap bencana dari kapasitas tempatan

Semua manusia dan masyarakat bahkan -dalam situasi bencana sekalipun- memiliki kapasitas selain kerentanan. Sejauh mungkin kami akan memperkuat kapasitas ini dengan mempekerjakan pekerja tempatan, membeli material tempatan dan berjual beli dengan perusahaan tempatan. Dimana memungkinkan, kami akan bekerja sama dengan NGHHA tempatan sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan bekerjasama dengan struktur pemerintah tuan rumah sebagaimana diperlukan. Kami memberikan prioritas tinggi terhadap koordinasi dari bantuan darurat kami. Hal ini paling baik dikerjakan di negara dimana bencana itu terjadi oleh mereka yang paling langsung terlibat dalam operasi bantuan darurat, dan harus melibatkan perwakilan dari badan-badan PBB yang terkait.

7 Cara yang harus ditemukan untuk melibatkan penerima dalam pengelolaan bantuan darurat.

Bantuan respons bencana tidak pernah boleh dipaksakan kepada penerima. Bantuan darurat dan rehabilitasi jangka panjang yang efektif dapat dicapai jika penerima dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan program bantuan. Kami harus berusaha sedapatnya untuk mencapai partisipasi sepenuhnya dari masyarakat dalam program bantuan darurat dan rehabilitasi kami.

8 Bantuan darurat harus berusaha mengurangi kerentanan di masa datang sementara memenuhi kebutuhan dasar

Semua tindakan bantuan darurat mempengaruhi prospek pembangunan jangka panjang, baik secara positif atau negatif. Menyadari ini, kami berusaha melaksanakan program bantuan darurat yang secara aktif mengurangi kerentanan penerima terhadap bencana di masa mendatang dan membantu menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan. Kami akan memberikan perhatian khusus masalah lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan program bantuan darurat kami. Kami juga akan berusaha meminimalkan akibat negatif dari bantuan kemanusiaan, menghindari ketergantungan jangka panjang penerima terhadap bantuan dari luar.

9 Kami menganggap diri kami akuntabel baik kepada mereka yang kami bantu maupun mereka yang memberikan sumberdaya kepada kami

Kami sering bertindak lembaga penghubung antara pihak yang ingin membantu dan pihak yang membutuhkan bantuan dalam bencana. Oleh sebab itu kami bertanggung jawab kepada kedua belah pihak tersebut. Semua yang kami kerjakan dengan donor dan penerima harus merefleksikan sikap keterbukaan dan transparansi. Kami menerima adanya keharusan untuk melaporkan aktivitas kami, baik dari sudut pandang keuangan dan sudut pandang efektivitas. Kami mengakui kewajiban kami untuk memastikan pemantauan yang tepat terhadap distribusi bantuan dan untuk melaksanakan pengkajian secara berkala terhadap dampak dari bantuan bencana. Kami berusaha untuk melaporkan secara terbuka mengenai dampak pekerjaan kami, dan faktor-faktor yang membatasi atau membantu dampak tersebut. Program kami akan berdasarkan pada standar profesionalisme dan kepakaran yang tinggi untuk menekan pemborosan sumber daya yang berharga.

10 Dalam kegiatan informasi, publikasi dan kampanye kami harus memperlakukan korban bencana sebagai manusia yang bermartabat dan bukannya sebagai obyek yang tidak lagi berpengharapan

Penghargaan kepada korban bencana sebagai mitra yang setara tidak boleh pernah dilupakan dalam tindakan kami.

Dalam kegiatan informasi publik kami harus memberikan gambaran obyektif mengenai situasi bencana dimana kapasitas dan aspirasi dari korban bencana ditonjolkan, bukan hanya kelemahan dan ketakutan mereka saja. Sementara kami bekerja sama dengan pihak media untuk mempertinggi respon publik, kami tidak akan membiarkan tuntutan publisitas, baik dari eksternal atau internal, mengalahkan prinsip untuk memaksimalkan bantuan darurat. Kami akan menghindari persaingan dengan lembaga bantuan lain dalam liputan media massa dalam situasi di mana liputan semacam itu mungkin justru merugikan pelayanan yang diberikan kepada penerima atau terhadap keamanan dari staf kami atau penerima bantuan.

Lingkungan Kerja

Setelah secara sepihak sepakat untuk mematuhi Kode perilaku di atas, kami memaparkan di bawah ini beberapa pedoman yang menjelaskan lingkungan kerja yang kami harap dapat diciptakan oleh pemerintah negara donor, pemerintah tuan rumah dan organisasi antarnegara-khususnya lembaga-lembaga PBB – untuk memfasilitasi partisipasi yang efektif dari NGHHA dalam respon bencana. Pedoman-pedoman ini semata-mata dipaparkan sebagai panduan. Mereka tidak mengikat secara hukum dan kami tidakd mengharapakan pemerintah dan IGO untuk mengindikasikan penerimaan mereka terhadap pedoman-pedoman ini melalui penandatanganan dokumen apapun, sekalipun mungkin itu merupakan suatu tujuan dimasa mendatang. Pedoman ini dipaparkan dalam semangat keterbukaan dan kerja sama sehingga mitra-mitra kami memahami suatu hubungan kerja ideal yang ingin kami bentuk bersama mereka.

Lampiran I : Rekomendasi untuk pemerintah negara yang terkena bencana

1 Pemerintah seharusnya menerima dan menghormati kemandirian, kemanusiaan dan ketidakberpihakan tindakan dari NGHHA

NGHHA adalah badan-badan mandiri. Kemandirian dan ketidakberpihakan ini seharusnya dihormati oleh pemerintah tuan rumah.

2 Pemerintah tuan rumah seharusnya memfasilitasi NGHHA untuk mempunyai akses yang cepat kepada korban bencana

Jika NGHHA harus bertindak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, mereka patut diberi akses yang cepat dan tidak memihak kepada korban bencana dengan tujuan memberikan bantuan kemanusiaan. Adalah tugas pemerintah tuan rumah, sebagai bagian dari pelaksanaan kedaulatan, untuk tidak menghalangi bantuan semacam itu, dan untuk menerima tindakan tidak memihak dan apolitik dari NGHHA. Pemerintah tuan rumah seharusnya memfasilitasi masuknya staf NGHHA dengan cepat, terutama dengan membebaskan persyaratan transit, visa masuk dan keluar, atau melakukan pengaturan-pengaturan tertentu yang membantu pemberian izin yang cepat. Pemerintah seharusnya memberikan izin terbang lintas dan hak mendarat bagi transportasi udara yang memuat bantuan darurat bencana internasional dan personilnya, untuk selama fase darurat.

3 Pemerintah seharusnya memudahkan kelancaran keluar masuknya barang bantuan dan informasi selama bencana

Bantuan bantuan darurat bencana dan peralatannya dibawa masuk dalam suatu negara dengan tujuan semata-mata untuk meringankan penderitaan manusia, bukan untuk keuntungan komersial. Bantuan semacam itu seharusnya diizinkan lewat dengan bebas dan tanpa halangan dan tidak menjadi subyek bagi persyaratan sertifikat konsulat atau

kuitansi pembelian, perijinan impor dan atau ekspor atau peraturan lain, atau terkena pajak impor, biaya pendaratan, atau biaya pelabuhan.

Impor sementara peralatan darurat termasuk kendaraan, pesawat terbang ringan dan peralatan telekomunikasi, seharusnya difasilitasi oleh pemerintah tuan rumah melalui pembebasan izin atau peraturan registrasi. Pemerintah seharusnya tidak melarang pemulangan kembali peralatan bantuan darurat bencana pada akhir operasi.

Untuk memfasilitasi komunikasi, pemerintah tuan rumah didorong untuk menetapkan frekuensi radio tertentu, yang akan dipergunakan oleh organisasi bantuan darurat bencana untuk komunikasi di dalam negeri dan internasional dengan tujuan untuk bantuan darurat bencana, dan untuk membuat frekuensi itu diketahui oleh komunitas bantuan darurat bencana sebelum bencana terjadi. Mereka seharusnya memperbolehkan personil lembaga bantuan darurat bencana untuk memanfaatkan semua jenis komunikasi yang mereka butuhkan untuk operasi bantuan darurat bencana.

4 Pemerintah seharusnya berusaha untuk memberikan informasi mengenai bencana yang terkoordinasi dan bantuan perencanaan

Keseluruhan perencanaan dan koordinasi usaha bantuan darurat bencana pada akhirnya adalah tanggung jawab pemerintah tuan rumah. Perencanaan dan koordinasi dapat ditingkatkan jika NGHHA diberikan informasi tentang bantuan darurat bencana yang dibutuhkan dan sistem pemerintahan dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha bantuan darurat dan juga informasi tentang potensi resiko keamanan yang mungkin akan mereka hadapi. Pemerintah didorong untuk memberikan informasi semacam itu kepada NGHHA.

Untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dan penggunaan bantuan bantuan darurat secara efisien, pemerintah tuan rumah didorong untuk, sebelum bencana terjadi, menunjuk satu titik kontak bagi NGHHA untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang di Negara tersebut.

5 Bantuan darurat bencana dalam konflik bersenjata

Dalam peristiwa konflik senjata, tindakan bantuan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.

Lampiran II : Rekomendasi untuk pemerintah donor

1 Pemerintah Donor seharusnya mengakui dan menghormati tindakan mandiri, kemanusiaan dan ketidakberpihakan dari NGHAs

NGHAs adalah badan-badan mandiri yang kemandirian dan ketidakpihakannya seharusnya dihormati oleh pemerintah donor. Pemerintah donor seharusnya tidak mempergunakan NGHAs untuk mencapai tujuan politik atau ideologis.

2 Pemerintah donor seharusnya memberikan dana dengan jaminan untuk kemandirian operasional

NGHAs menerima bantuan dana dan materi dari pemerintah donor dengan semangat yang sama pada saat memberikan kepada korban bencana, yaitu semangat kemanusiaan dan kemandirian tindakan. Pelaksanaan dari tindakan bantuan darurat merupakan tanggung jawab penuh dari NGHAs dan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan NGHAs.

3 Pemerintah donor seharusnya mempergunakan pengaruh mereka untuk membantu NGHAs memperoleh akses terhadap korban bencana

Pemerintah donor seharusnya memahami pentingnya mereka memikul beberapa tanggung jawab atas keamanan dan kebebasan akses dari staf NGHAs terhadap lokasi bencana. Mereka seharusnya bersedia untuk menggunakan diplomasi dengan pemerintah tuan rumah untuk mengatasi situasi semacam itu bilamana diperlukan.

Lampiran III : Rekomendasi untuk organisasi –organisasi antarnegara

1 IGO seharusnya menerima NGHAs, tempatan dan asing, sebagai mitra-mitra yang penting

NGHAs bersedia untuk bekerja sama dengan PBB atau lembaga antarnegara yang lain untuk memperoleh hasil yang bantuan darurat yang lebih baik. Mereka melakukan ini

dalam semangat bekerja sama dengan menghormati integritas dan kemandirian dari semua mitra. Lembaga antarnegara harus menghormati kemandirian dan ketidakberpihakan NGHAs. NGHAs seharusnya diajak berkonsultasi oleh lembaga-lembaga PBB dalam mempersiapkan rencana bantuan darurat.

2 IGO seharusnya membantu pemerintah tuan rumah dalam menyusun kerangka kerja koordinasi menyeluruh untuk bantuan darurat bencana tempatan dan internasional

NGHA biasanya tidak memiliki mandat untuk menyediakan kerangka kerja koordinasi menyeluruh untuk bencana yang membutuhkan respon internasional. Tanggung jawab ini jatuh ke tangan pemerintah tuan rumah dan pihak-pihak yang relevan di PBB. Mereka didorong untuk memberikan pelayanan ini dalam waktu dan cara yang tepat untuk melayani Negara-negara yang terkena bencana dan komunitas respons bencana nasional dan internasional. Bagaimanapun, NGHAs harus melaksanakan segala upaya untuk memastikan koordinasi yang efektif dari pelayanan mereka sendiri.

Dalam situasi konflik bersenjata, tindakan bantuan darurat diatur oleh ketentuan hukum humaniter internasional yang relevan.

3 IGO seharusnya memperluas kepada NGHAs perlindungan keamanan yang disediakan untuk PBB

Di mana perlindungan keamanan disediakan untuk organisasi antarnegara, perlindungan ini seharusnya diperluas kepada mitra operasi mereka dari NGHAs kalau diminta.

4 IGO seharusnya memberikan NGHAs akses yang sama atas informasi yang relevan seperti yang diberikan kepada organisasi-organisasi PBB

IGO disarankan untuk membagi semua informasi, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan dari respons

bencana yang efektif, dengan mitra operasi mereka dari NGHHA.

3 Penghargaan

Staff Tim Project Sphere

Project Manager: Nan Buzard

Training Manager: Sean Lowrie

Project Officer: Veronica Foubert

Project Senior Assistant: Elly Proudlock

Komisi Manajemen Proyek Sphere

InterAction, Save the Children Alliance CARE International, The Lutheran World Federation (ACT), Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies (VOICE), Mercy Corps, Action by Churches Together (ACT), Oxfam GB, Steering Committee for Humanitarian Response, International Committee of the Red Cross, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, International Council of Voluntary Agencies (ICVA), Caritas Internationalis

Donor-donor

Disamping kontribusi dari organisasi anggota yang terdaftar di atas, pendanaan Proyek Sphere juga disediakan oleh:

The Australian Agency for International Development (AusAID), The Belgian Ministry of Development, The Canadian International Development Agency (CIDA), Caritas Spain, Danish International Development Assistance (DANIDA), The Disaster Emergency Committee (DEC), The Finnish Government Development Agency (FINIDA), The European Community Humanitarian Office (ECHO), The Ford Foundation, Development Cooperation Ireland (DCI), The Netherlands Ministry of Foreign Affairs Humanitarian Aid Division, The New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, The Foreign Ministry of Norway, The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), The United Nations Children's Fund (UNICEF), The United Kingdom Department for International Development (DFID), The United States Department of State Bureau of Refugees and Migration (US-PRM), The United States Agency for International Development Office of Foreign Disaster Assistance (US-OFDA)

Focal Point Bab-Bab Teknis

Air bersih, sanitasi dan Penyuluhan Kebersihan: Andy Bastable, Oxfam GB

Ketahanan Pangan: Helen Young, Tufts University

Gizi: Anna Taylor, Save the Children UK

Bantuan Pangan: John Solomon, CARE USA and NM Prusty, CARE India

Tempat hunian, penampungan dan barang-barang bantuan non-pangan: Graham Saunders, Catholic Relief Services

Pelayanan-pelayanan Kesehatan: Richard J Brennan, International Rescue Committee

Standar-standar umum: di samping para focal point dan cross-cutters, orang-orang berikut ini memberikan sumbangan untuk bab ini: Jock Baker, Nan Buzard, Jim Good, Maurice Henderson, Susanne Jaspars, Charles Kelly, Ron Ockwell, Sylvie Robert

Koordinator Isu-Isu lintas sektor

Anak-anak: Jane Gibreel, Save the Children UK

Par alanjut usia: Nadia Saim, HelpAge International

Penyandang cacat: Beverly Ashton, Action on Disability and Development

Jender: Rosemarie McNairn, Oxfam GB

Perlindungan: Ed Schenkenberg, ICVA

HIV/AIDS: Paul Spiegel, UNHCR/CDC

Lingkungan: Mario Pareja, CARE/UNHCR

Fasilitator rapat-rapat revisi buku pegangan: Isobel McConnan

Editor: David Wilson

Ucapan Terimakasih

Standar-standar dan indikator Sphere dibangun dari pengalaman kolektif dan praktek-praktek yang baik dari orang perorangan dan lembaga-lembaga yang bergerak aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Seperti halnya dengan buku pegangan edisi pertama, revisi ini juga tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa kerjasama dan sumbangan dari banyak pihak diseluruh dunia. Tidak kurang dari ribuan orang dari 80 negara, meeakili lebih dari 400 organisasi telah bekerjasama dalam proses, menyumbangkan secara sukarela waktu dan kepakaran mereka.

Penekanan yang diberikan selama proses pengembangan buku pegangan ini memang adalah konsultasi, melalui jejaring kelompok-kelompok review antar rekan yang terlibat disemua tahap. Khususnya para pekerja respons bencana yang memberikan umpan balik dari negara-negara dimana bencana menjadi kejadian yang berkala, dan yang menggunakan buku pegangan di lapangan. Hasil akhirnya tidak mencerminkan sudut pandang dari lembaga tertentu. Hasil akhirnya mewakili kemauan yang aktif dan hasrat dari masyarakat pekerja kemanusiaan untuk bersama-sama dalam berbagi pengalaman dan pelajaran yang sangat luas, dalam upaya mereka untuk memperbaiki mutu dan akuntabiliti tindakan-tindakan kemanusiaan. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan cita-cita ini.

Sementara Sphere mengucapkan terimakasih atas sumbangan dari semua orang yang telah berperanserta, baik pada buku pegangan edisi pertama dan revisi ini, daftarnya akan sangat panjang melebihi 40 halaman dan tidak akan cukup tempat untuk menyebutkan mereka semua. Walaupun demikian, suatu dafatar yang lengkap dari orang-perorangan dan lembaga-lembaga yang berperanserta dapat dilihat di website Sphere yaitu: <http://www.sphereproject.org>

4 Daftar Singkatan

ACC/SCN: United Nations Administrative Committee on
Coordination/Subcommittee on Nutrition
ACT: Action by Churches Together
ALNAP: Active Learning Network for Accountability in Practice
CDC: Centers for Disease Control and Prevention
DAC: Development Assistance Committee (OECD)
FAO: Food and Agriculture Organisation
IAPSO: Inter-Agency Procurement Services Office (UNDP)
ICRC: International Committee of the Red Cross
INFCD: International Nutrition Foundation for Developing
Countries
LWF: The Lutheran World Federation
MISP: Minimum Initial Service Package
MSF: Médecins Sans Frontières
NCHS: National Centre for Health Statistics
NGO: Non-governmental organisation
OCHA: UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs
OECD: Organisation for Economic Cooperation and
Development
OFDA: Office of Foreign Disaster Assistance (USAID)
PTSS: Programme and Technical Support Section (UNHCR)
SCHR: Steering Committee for Humanitarian Response
UNDP: United Nations Development Programme
UNDRO: United Nations Disaster Relief Organisation
UNEP: United Nations Environment Programme
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF: United Nations Children's Fund
USAID: United States Agency for International Development
WCRWC: Women's Commission for Refugee Women and
Children
WFP: World Food Programme
WHO: World Health Organisation
WMO: World Meteorological Organisation

5 SEKAPUR SIRIH

MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA (MPBI)

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) adalah suatu organisasi nirlaba yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2003 berdasarkan kesadaran bahwa Indonesia termasuk salah satu negara paling dan semakin rawan bencana sementara kemampuan penanggulangannya belum memadai. Keadaan tersebut memerlukan penanganan menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan semua pihak berazaskan kemanusiaan. Juga kesadaran bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Di MPBI, para ilmuwan, manajer penanggulangan bencana, praktisi dan orang-orang yang peduli terhadap bencana mengupayakan penanggulangan bencana yang lebih baik dengan mengembangkan penanggulangan bencana baik sebagai ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan, dan praktek profesi demi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan MPBI adalah untuk menjadi mitra kritis para pelaku penanggulangan bencana demi tercapainya praktik yang dilaksanakan secara profesional dan yang selaras antara ilmu dan praktek yang, pada akhirnya akan membantu terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MPBI mengembangkan penanggulangan bencana melalui pendidikan, penelitian, dan penerapan; meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota; menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga, instansi, dan/atau organisasi profesi lain di dalam dan di luar negeri; merumuskan dan mengawasi kode etik penanggulangan bencana; melakukan penyebaran informasi kepada Masyarakat tentang kaidah-kaidah penanggulangan bencana; dan membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Sejauh ini MPBI dikenal melalui kegiatan kegiatannya, antara lain kemitraannya dengan berbagai lembaga dalam melaksanakan hari pengurangan bencana sedunia setiap tahun, perumusan model Pedoman Umum Penanggulangan Bencana; ikut mengembangkan strategi penanggulangan bencana berbasis masyarakat, memperkenalkan dan mendorong penggunaan piagam kemanusiaan dan standar-standar minimum dalam respons bencana oleh Proyek Sphere.

Keanggotaannya MPBI adalah orang-perorangan dari berbagai sektor baik pemerintah maupun non-pemerintah termasuk badan-badan PBB dan LSM baik nasional maupun internasional. MPBI juga mengundang mitra lembaga untuk menjadi organisasi afiliasi. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat MPBI telepon 021- 385 4943.

Piagam Kemanusiaan dan Standar- Standar Minimum dalam Respons Bencana

Piagam Kemanusiaan dan Standar-standar Minimum dalam Respons Bencana dari Proyek Sphere merupakan suatu prakarsa internasional yang mengagumkan dan bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan. Buku pegangan edisi baru ini telah direvisi dan dimutakhirkan secara menyeluruh, dengan memasukkan perkembangan-perkembangan terbaru di praktek-praktek kemanusiaan, bersama dengan umpan balik dari para pelaksana di lapangan, institut-institut penelitian dan para pakar lintas sektor di bidang jender, anak-anak, lanjut usia, penyandang cacat, HIV/AIDS dan lingkungan. Buku pegangan yang telah direvisi ini adalah suatu hasil dari usaha-usaha kolaboratif yang sangat meluas dan mencerminkan hasrat bersama dan berbaginya pengalaman diantara masyarakat kemanusiaan, dan tekad mereka untuk memperbaiki pengetahuan yang sudah ada sekarang tentang program-program bantuan kemanusiaan.

Saka guru dari buku ini adalah Piagam Kemanusiaan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan pasal-pasal hukum-hukum internasional humaniter, hak azasi dan pengungsi, dan juang pada prinsip-prinsip dari Kode Perilaku Palang Merah dan ORNOP. Piagam ini menggambarkan prinsip inti yang mengatur tindakan-tindakan kemanusiaan dan mengajukan hak-hak penduduk terhadap perlindungan dan bantuan. Standar-standar minimum disusun kedalam bab awal yang merinci standar-standar proses untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program bersama dengan empat bab teknis meliputi air bersih, sanitasi dan penyuluhan kebersihan; keamanan pangan, gizi dan bantuan pangan; tempat hunian, penampungan dan barang-barang bantuan non-pangan; serta pelayanan-pelayanan kesehatan.

Sebagai alat praktis, Piagam Kemanusiaan dapat digunakan untuk mendefinisikan tujuan akhir proyek sementara Standar-Standar Minimum, bersama dengan indikator-indikator dan catatan-catatan panduannya, dapat digunakan sebagai alat kajian analisis terhadap kebutuhan program dan penyusunan kerangka kerja untuk pemantauan kemajuan proyek dan mengevaluasi keluarannya. Bersama-sama, Sphere juga menyediakan suatu alat yang kuat dan bagus untuk koordinasi dan advokasi, khususnya dalam cakupan multisektoral dan kaitannya dengan prinsip-prinsip praktek.